

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI AGROWISATA DI DESA MANDALASARI KECAMATAN CIKALONGWETAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

Firna Dwi Nopitasari¹⁾

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas
Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Email: firmadwi013@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi agrowisata di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan agrowisata meskipun desa memiliki potensi wisata alam, pertanian, dan budaya yang cukup besar. Penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri atas pemerintah desa, pengelola BUMDes, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Analisis penelitian menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang meliputi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan keempat peran tersebut dalam upaya pengembangan agrowisata, namun pelaksanaannya belum optimal. Kendala yang ditemukan meliputi belum adanya regulasi khusus mengenai agrowisata, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, belum aktifnya kelembagaan pengelola wisata, serta belum optimalnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penguatan regulasi, kelembagaan, fasilitas pendukung, dan kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Desa, Agrowisata, Pengembangan Potensi Desa, Pariwisata Berkelanjutan, Pembangunan Desa

Abstract

This study aims to analyze the role of the village government in the development of agro-tourism potential in Mandalasari Village, Cikalongwetan District, West Bandung Regency. The study was motivated by the suboptimal development of agro-tourism despite the village's considerable potential in natural tourism, agriculture, and cultural resources. A descriptive qualitative approach was employed in this research. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the village government, Village-Owned Enterprise (BUMDes)

management, community leaders, and other relevant stakeholders. The analysis was based on Ryaas Rasyid's theory of government roles, which encompasses the functions of regulator, facilitator, dynamizer, and catalyst. The findings indicate that the Mandalasari Village Government has carried out these four roles in supporting agro-tourism development; however, their implementation has not yet been optimal. Several challenges were identified, including the absence of specific regulations governing agro-tourism, inadequate supporting infrastructure and facilities, inactive tourism management institutions, and insufficient collaboration among stakeholders. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, institutional capacity, supporting facilities, and cross-sectoral collaboration is essential to achieving sustainable agro-tourism development.

Keywords: *Village Government Role, Agro-tourism, Village Potential Development, Sustainable Tourism, Rural Development.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan nasional karena desa memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta potensi yang dimiliki desa. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa adalah melalui pengembangan potensi lokal yang dimiliki setiap wilayah.

Salah satu potensi yang banyak dikembangkan di wilayah pedesaan adalah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata berbasis desa tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian lokal. Dalam perkembangannya, konsep agrowisata menjadi salah satu alternatif yang banyak diterapkan karena mampu mengintegrasikan sektor pertanian dengan kegiatan wisata. Agrowisata memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian sekaligus menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat desa melalui kegiatan wisata, edukasi, dan ekonomi kreatif.

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi wisata alam dan pertanian yang cukup besar. Kondisi geografis yang didominasi wilayah pegunungan dan lahan pertanian menjadikan Kabupaten Bandung Barat memiliki berbagai destinasi wisata berbasis alam dan pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan secara

berkelanjutan. Salah satu desa yang memiliki potensi tersebut adalah Desa Mandalasari, Kecamatan Cikalongwetan.

Desa Mandalasari memiliki berbagai potensi yang dapat mendukung pengembangan agrowisata, antara lain Curug Ciraja sebagai wisata alam, kawasan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan berbagai komoditas seperti pisang, singkong, alpukat, durian, dan pepaya, serta Situs Gegerhanjuang yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Keberadaan potensi tersebut menunjukkan bahwa Desa Mandalasari memiliki peluang untuk mengembangkan sektor agrowisata sebagai salah satu strategi pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, potensi agrowisata yang dimiliki Desa Mandalasari belum berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil observasi awal penelitian, ditemukan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur pengembangan agrowisata di desa, kelembagaan pengelola wisata belum berjalan secara optimal, serta sarana dan prasarana pendukung wisata masih terbatas. Selain itu, kerja sama antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak terkait dalam pengembangan agrowisata masih belum terintegrasi secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan potensi wisata yang dimiliki desa belum mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap pembangunan dan perekonomian masyarakat.

Dalam pengembangan potensi desa, pemerintah desa memiliki peran penting sebagai aktor utama pembangunan lokal. Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2014), pemerintah memiliki empat fungsi utama dalam pembangunan, yaitu sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Melalui peran tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menciptakan kebijakan yang mendukung, menyediakan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak guna mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, permasalahan penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan: *bagaimana peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi agrowisata di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat?* Adapun tujuan penelitian ini

adalah untuk menganalisis peran Pemerintah Desa Mandalasari dalam pengembangan potensi agrowisata berdasarkan fungsi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi agrowisata di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Objek penelitian adalah peran Pemerintah Desa Mandalasari dalam pengembangan agrowisata yang dianalisis berdasarkan fungsi pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Subjek penelitian terdiri atas Kepala Desa Mandalasari, perangkat desa, pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), tokoh masyarakat, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan potensi agrowisata. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pemahaman informan terhadap permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun studi lapangan dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti yang didukung oleh pedoman wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi penelitian. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada peran Pemerintah Desa dalam pengembangan potensi agrowisata di Desa Mandalasari Kecamatan Cikalongwetan Kabupaten Bandung Barat. Dalam penelitian ini, analisis

dilakukan menggunakan teori peran pemerintah menurut Ryaas Rasyid yang terdiri atas empat dimensi, yaitu regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Keempat dimensi tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana Pemerintah Desa Mandalasari menjalankan perannya dalam mengembangkan potensi agrowisata yang dimiliki desa. Adapun hasil penelitian pada masing-masing dimensi dijelaskan sebagai berikut.

1. Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan fungsi regulator dalam pengembangan potensi agrowisata melalui berbagai kebijakan pembangunan yang mendukung pemanfaatan potensi desa. Upaya tersebut tercermin dalam perencanaan pembangunan desa yang memuat program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan sektor pertanian sebagai potensi unggulan desa. Pemerintah desa juga memberikan perhatian terhadap potensi wisata yang dimiliki Desa Mandalasari, seperti Curug Ciraja, kawasan pertanian dan perkebunan, serta Situs Gegerhanjuang sebagai aset yang dapat mendukung pembangunan desa.

Namun demikian, pelaksanaan fungsi regulator belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa maupun kebijakan khusus yang secara spesifik mengatur pengembangan agrowisata di Desa Mandalasari. Ketidadaan regulasi tersebut menyebabkan arah pengembangan agrowisata belum memiliki pedoman yang jelas dan terukur. Akibatnya, berbagai potensi wisata yang dimiliki desa masih berkembang secara parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem pengelolaan yang berkelanjutan.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2014), pemerintah sebagai regulator memiliki tugas untuk menciptakan aturan dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan teori tersebut, Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan fungsi regulator melalui kebijakan pembangunan desa secara umum, namun belum sepenuhnya optimal karena belum didukung oleh regulasi khusus yang mengatur pengembangan agrowisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih

spesifik agar pengembangan agrowisata memiliki arah yang jelas dan berkelanjutan.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai Fasilitator

Peran fasilitator ditunjukkan melalui berbagai upaya pemerintah desa dalam menyediakan dukungan bagi masyarakat dan potensi lokal yang dimiliki desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah berupaya mendukung pengembangan potensi desa melalui pembangunan infrastruktur, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta penyediaan fasilitas yang menunjang aktivitas pertanian dan ekonomi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan potensi desa.

Meskipun demikian, fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengembangan agrowisata. Beberapa lokasi wisata masih menghadapi keterbatasan sarana pendukung, seperti aksesibilitas, papan informasi, fasilitas pengunjung, serta media promosi yang memadai. Selain itu, belum adanya fasilitas yang secara khusus dirancang untuk mendukung kegiatan wisata edukasi berbasis pertanian menyebabkan potensi agrowisata belum berkembang secara maksimal.

Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2014) menjelaskan bahwa pemerintah sebagai fasilitator bertugas menyediakan berbagai sarana, dukungan, dan kemudahan yang dibutuhkan masyarakat dalam proses pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan fungsi tersebut melalui penyediaan berbagai fasilitas dasar dan dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, peran fasilitator masih perlu diperkuat melalui peningkatan sarana dan prasarana wisata agar pengembangan agrowisata dapat berjalan lebih optimal.

3. Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah berupaya menjalankan peran sebagai dinamisator dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa. Upaya tersebut dilakukan melalui musyawarah desa, sosialisasi program, serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan

potensi desa. Pemerintah desa juga berusaha membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan potensi lokal sebagai sumber peningkatan kesejahteraan.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan agrowisata masih belum optimal. Sebagian masyarakat belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai manfaat agrowisata sehingga keterlibatan mereka masih terbatas. Selain itu, belum aktifnya kelompok sadar wisata (Pokdarwis) menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terbentuknya gerakan masyarakat yang kuat dalam mendukung pengembangan agrowisata.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2014), pemerintah sebagai dinamisator berperan dalam mendorong, menggerakkan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, Pemerintah Desa Mandalasari telah berupaya menjalankan fungsi tersebut melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, hasil yang diperoleh belum optimal karena tingkat keterlibatan masyarakat masih beragam dan belum didukung oleh kelembagaan yang aktif. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan agrowisata.

4. Peran Pemerintah Desa sebagai Katalisator

Peran katalisator diwujudkan melalui upaya pemerintah desa dalam membangun kerja sama dan mempercepat proses pengembangan potensi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, masyarakat, BUMDes, dan pihak lain yang berpotensi mendukung pengembangan agrowisata. Beberapa bentuk kerja sama juga telah dilakukan dalam mendukung pengembangan potensi wisata dan promosi desa.

Meskipun demikian, kerja sama yang terjalin belum berlangsung secara berkelanjutan dan belum menghasilkan sistem pengelolaan agrowisata yang terintegrasi. Belum aktifnya kelembagaan pengelola wisata menyebabkan

koordinasi antar pemangku kepentingan belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal dalam mendukung pengembangan agrowisata masih relatif terbatas sehingga berbagai potensi yang dimiliki desa belum dapat dikembangkan secara maksimal.

Menurut Ryaas Rasyid (dalam Labolo, 2014), pemerintah sebagai katalisator berperan mempercepat proses pembangunan melalui penciptaan kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan fungsi katalisator melalui upaya membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena belum didukung oleh kemitraan yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan jejaring kerja sama serta revitalisasi kelembagaan wisata agar pengembangan agrowisata dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Mandalasari telah menjalankan perannya dalam pengembangan potensi agrowisata melalui fungsi regulator, fasilitator, dinamisator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah desa telah mendukung pengembangan potensi desa melalui perencanaan pembangunan, namun belum didukung oleh regulasi khusus yang mengatur pengembangan agrowisata. Sebagai fasilitator, pemerintah desa telah menyediakan berbagai dukungan dan fasilitas bagi masyarakat, meskipun sarana dan prasarana penunjang wisata masih terbatas. Sebagai dinamisator, pemerintah desa telah berupaya mendorong partisipasi masyarakat melalui berbagai kegiatan pemberdayaan, namun keterlibatan masyarakat dan kelembagaan wisata belum berjalan secara optimal. Sementara itu, sebagai katalisator, pemerintah desa telah membangun komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, tetapi kolaborasi yang terjalin belum berkelanjutan dan belum mampu mengintegrasikan seluruh potensi wisata yang dimiliki desa. Dengan demikian, peran Pemerintah Desa Mandalasari dalam pengembangan agrowisata telah dilaksanakan, namun belum optimal. Oleh

karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, revitalisasi kelembagaan pengelola wisata, serta pengembangan kemitraan yang berkelanjutan guna mewujudkan pengembangan agrowisata yang mampu mendukung pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, V., & Fauzi, A. (2022). Pengembangan agrowisata berbasis masyarakat dalam mendukung pembangunan desa berkelanjutan. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 4(2), 112–123.
- Fauziyah, N., & Kurniawan, D. (2021). Peran pemerintah desa dalam pengembangan potensi wisata berbasis lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 45–58.
- Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2023). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R., & Suryani, E. (2020). Collaborative governance dalam pengembangan desa wisata. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 87–99.
- Prasetyo, A., & Widodo, S. (2023). Strategi pengembangan agrowisata berbasis potensi lokal di kawasan pedesaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 19(1), 55–67.
- Rahmawati, D., & Hidayat, T. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata berbasis pertanian. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(2), 101–114.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susanti, R., & Maulana, I. (2021). Optimalisasi peran pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(3), 211–223.
- Utama, I. G. B. R. (2016). *Agrowisata sebagai pariwisata alternatif Indonesia*. Deepublish.
- Wahyuni, S., & Firmansyah, R. (2024). Pengelolaan potensi wisata desa melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 34–46.

Yuliani, E., & Pratama, H. (2023). Peran kelembagaan desa dalam mendukung pengembangan pariwisata berkelanjutan. *Jurnal Governance*, 8(2), 72–84.